

BUKU I RINGKASAN EKSEKUTIF



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI**

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan hal yang wajar terjadi dan disebabkan oleh faktor alam serta manusia. Faktor alam biasanya dapat pulih sendiri, namun faktor manusia seringkali menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan memerlukan penanganan serius. Isu-isu seperti alih fungsi lahan, pencemaran air sungai, pencemaran udara, serta persampahan perlu mendapat perhatian khusus. Setiap pihak memiliki kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yang memerlukan informasi lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan dipublikasikan kepada masyarakat, mencakup status lingkungan dan peta rawan lingkungan.

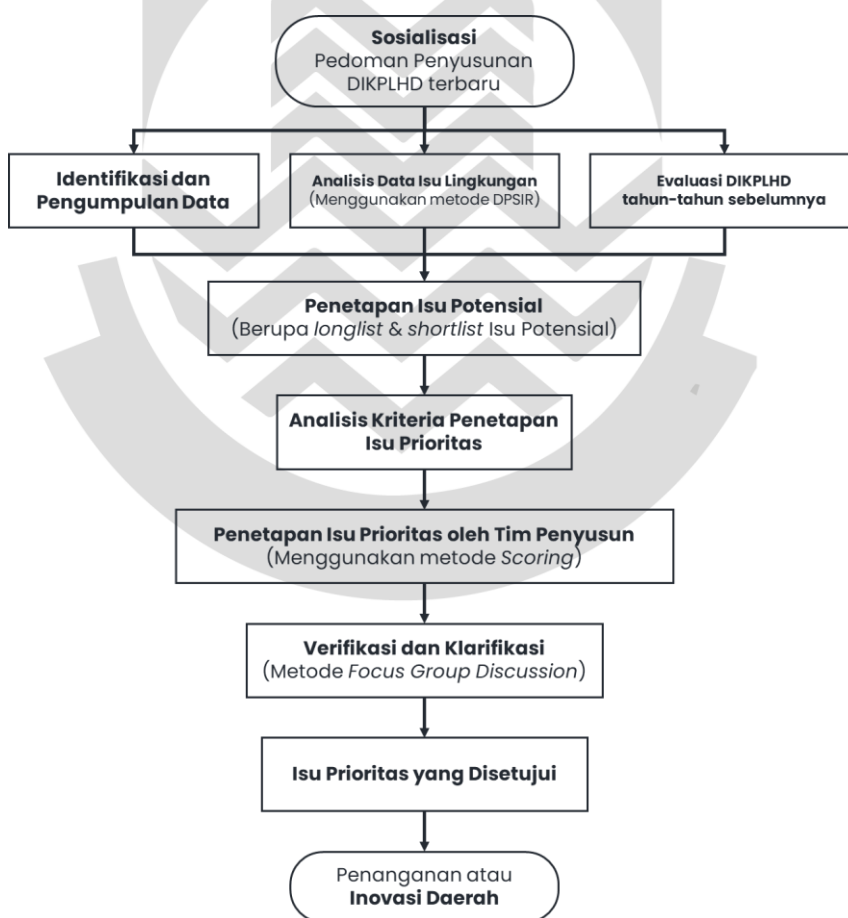
Pemerintah Kota Cimahi telah mengambil langkah dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas publik. DIKPLHD ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan berisi pengumpulan, analisis data, dokumentasi kebijakan, serta penyajian informasi dengan model DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, and Response). Dokumen ini menjadi bagian penting dari sistem informasi lingkungan hidup yang membantu penilaian dan penentuan isu prioritas serta pembuatan rekomendasi kebijakan lingkungan yang sesuai dengan amanat undang-undang dan mendukung misi pembangunan berkelanjutan Kota Cimahi.

1.2 Gambaran Singkat Proses Penyusunan DIKPLHD Tahun 2023

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi dilakukan oleh tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota Cimahi yang keanggotaannya

melibatkan unsur-unsur Perangkat Daerah (PD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Sedangkan pembentukan tim penyusun DIKPLHD keanggotaannya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi.

Tugas tim penyusun meliputi menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force-Pressure-State-Response* (DPSIR), mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi tahun 2024. Langkah-langkah penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Diagram Alir Penyusunan Dokumen IKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024

II. ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE*

2.1 Tata Guna Lahan

Tujuan penataan ruang wilayah kota yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika. Adapun *framework* (kerangka kerja) analisis DPSIR isu tata guna lahan dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2 *Framework* DPSIR Isu Tata Guna Lahan

2.1.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Pembangunan Perkotaan
- c) Pertumbuhan Industri di Kota Cimahi

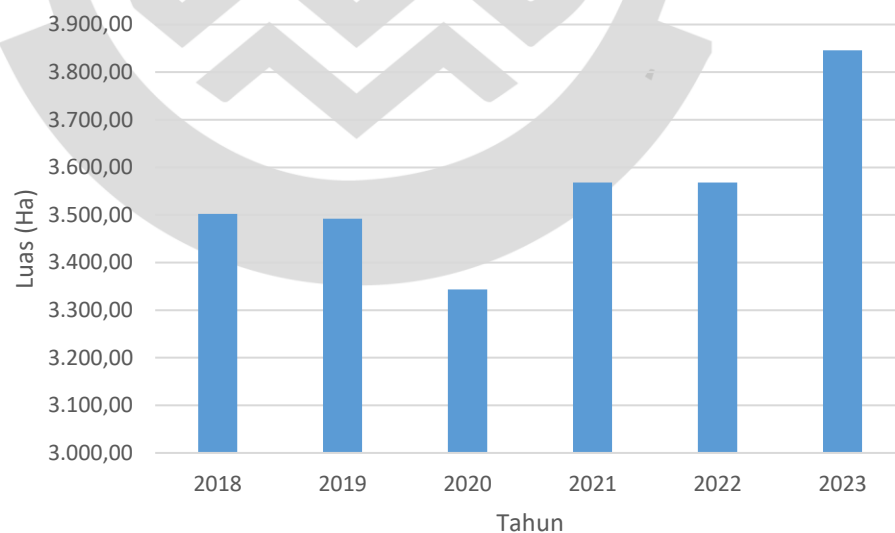
2.1.2 *Pressure*

- a) Konversi Lahan di Kota Cimahi
- b) Pembangunan Infrastruktur
- c) Ekspansi terhadap Wilayah Pertanian, Hutan

2.1.3 *State*

- a) Kondisi Lahan di Kota Cimahi

Kota Cimahi umumnya memiliki penggunaan lahan yang intensif, dengan banyak permukiman, bisnis, dan fasilitas umum. Penggunaan lahan dan pengelolaan lahan memiliki kaitan yang erat dengan sumber daya alam seperti air, tanah, nutrisi, tanaman dan hewan. lahan non pertanian di Kota Cimahi seluas 3.845,54 Ha. Jika dilihat dari tren penggunaan lahan utama di Kota Cimahi, luas lahan non pertanian pada tahun 2023 terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu seluas 3.568 Ha. Tingginya kebutuhan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang, maupun kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan.



Gambar 3 Tren Luas Penggunaan Lahan Non Pertanian di Kota Cimahi

b) Fragmentasi Habitat

Kondisi lahan saat ini tidak terlepas dari kebijakan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032 yang telah disebutkan, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung termasuk dalam zonasi perlindungan dalam dokumen RPPLHD Kota Cimahi, yaitu daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa yang sangat penting dan menentukan dalam memastikan ekosistem berfungsi secara optimal.

c) Hilangnya Lahan Terbuka

Di Kota Cimahi sendiri tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan, sehingga Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, pengendalian bahaya banjir, pengelolaan air tanah, penahan angin, dan lain sebagainya. Luas hutan kota di Kota Cimahi sebesar 237,12 Ha yang terletak di beberapa lokasi.

2.1.4 Impact

- a) Kehilangan Keanekaragaman Hayati
- b) Peningkat Risiko Bencana
- c) Perubahan Iklim Lokal

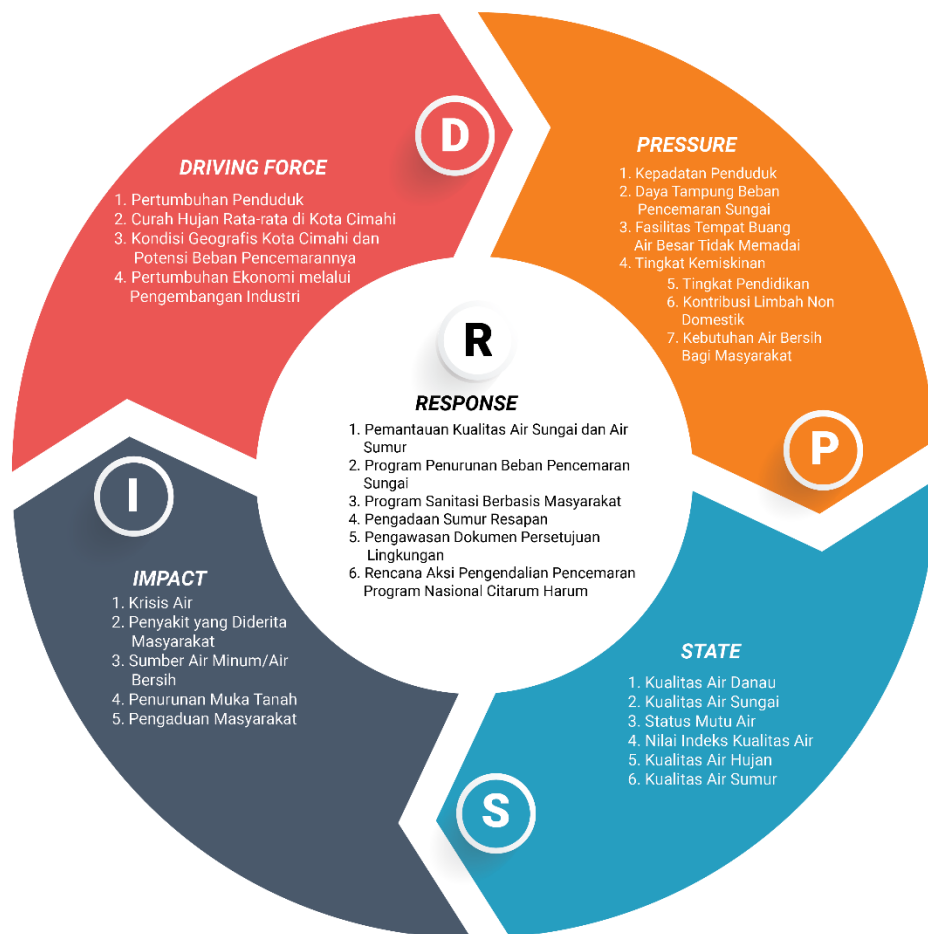
2.1.5 Response

- a) Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan
- b) Pengawasan Pembangunan
- c) Pelestarian dan Restorasi Habitat
- d) Penghijauan dan Pengoptimalan RTH
- e) *Biodiversity by Design*

2.2 Kualitas dan Kuantitas Air

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Mata air yang ada di Kota Cimahi adalah Mata Air Cikuda dan Mata

Air Cisintok. *Framework* atau kerangka kerja analisis isu kualitas air dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 4 Framework DPSIR Isu Kualitas Air

2.2.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Curah Hujan Rata-rata di Kota Cimahi
- c) Kondisi Geografis Kota Cimahi dan Potensi Beban Pencemarnya
- d) Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri

2.2.2 *Pressure*

- a) Kepadatan Penduduk
- b) Daya Tampung Beban Pencemar Sungai
- c) Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak memadai
- d) Tingkat Kemiskinan
- e) Kontribusi Volume Limbah Non Domestik

- f) Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat

2.2.3 *State*

- a) Kualitas Air Danau/waduk/situ/embung

Pemantauan kualitas air danau/waduk/situ/embung di Kota Cimahi dilakukan pada bulan Februari, dengan 6 lokasi titik pantau. Lokasi pemantauan kualitas air danau di Embung Brigif, Embung Cibabat, Embung Ciseupan, Kolam Retensi Pasirkaliki, Embung Pemkot, dan Embung Setiamanah. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi parameter DO, BOD, COD, *Total Coliform*, fenol, minyak dan lemak tidak memenuhi baku mutu, sedangkan TSS, TDS, *Fecal Coliform* masih ada beberapa titik yang memenuhi baku mutu kualitas air danau berdasarkan PP 22 tahun 2021 Lampiran VI.

- b) Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Maret (bulan basah), Bulan Juni (bulan kering) dan Bulan Oktober (bulan basah) untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Terdapat 5 sungai yang diuji kualitas air sungainya, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum. Analisis tingginya parameter *Total Suspended Solid* (TSS) disebabkan oleh adanya buangan limbah dari kegiatan domestik atau industri, serta kehadiran zat padat di dalam badan air juga dapat disebabkan oleh adanya kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa oleh air. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bahwa konsentrasi TSS pada air sungai di Kota Cimahi terdapat 23 titik yang melebihi baku mutu. Data BOD biasanya dipergunakan untuk mengetahui besaran limbah yang perlu diolah secara biologis, dan untuk melihat potensi perubahan maksimum pada BOD sungai yang akan menerima buangan air limbah/cemaran. Berdasarkan data pemantauan, konsentrasi BOD pada anak sungai di Kota Cimahi belum ada yang memenuhi baku mutu. Parameter COD merupakan jumlah total oksigen yang

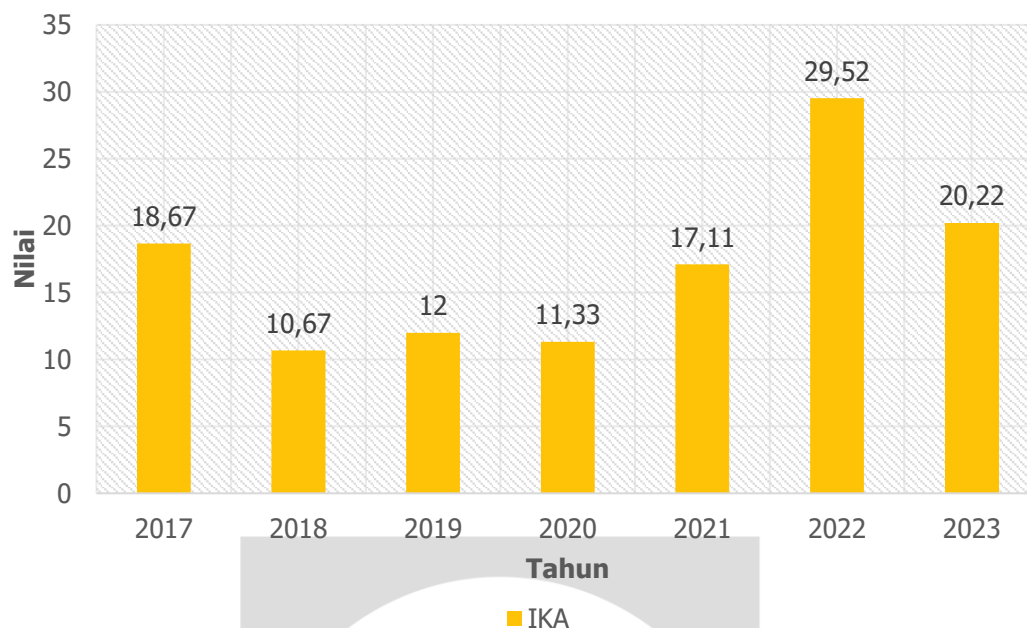
dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis, menjadi karbon dioksida dan air. Sama halnya dengan parameter BOD, konsentrasi COD pada anak-anak sungai di Kota Cimahi masih belum menunjukkan pengendalian pencemaran yang optimal. Nilai konsentrasi COD paling tinggi berada di Sungai Cibeureum bagian Hilir yang mencapai nilai 2.337 mg/L. Bakteri *coliform* total meliputi semua jenis bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35°C. Potensi pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, sehingga konsentrasi *fecal coliform* terlampaui tinggi.

c) Status Mutu Air

Penilaian status mutu air untuk setiap sungai di 3 titik pantau (hulu, tengah, hilir) dengan 3 periode pemantauan. Hasil pemantauan kelima sungai di Kota Cimahi menunjukkan jumlah titik pantau Cemar Berat sebanyak 26 titik, Cemar Sedang sebanyak 15 titik, dan Cemar Ringan sebanyak 4 titik.

d) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air Kota Cimahi tahun 2023 dihitung berdasarkan persentase jumlah titik pantau tiap status mutu terhadap total data terpantau. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2023 indeks kualitas air sungai di Kota Cimahi bernilai 20,22. Nilai IKA jika dihitung menggunakan metode yang sama, nilainya masih termasuk ke dalam klasifikasi buruk.



Gambar 5 Tren Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi

e) Kualitas Air Hujan

Pemerintah Kota Cimahi juga melakukan pemantauan pada kualitas air hujan di 4 (empat) titik pemantauan, yaitu industri, permukiman, perkantoran, dan transportasi. Berdasarkan hasil pemantauan parameter pH, nilai pH kualitas air hujan di Kota Cimahi berada di sekitar 6-7. Rendahnya nilai pH mengindikasikan terjadinya hujan asam, hal ini diikuti dengan kualitas SO_4 dan NO_3 yang tinggi di titik pantau industri.

f) Kualitas Air Sumur

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menguji 30 titik air sumur dalam satu periode yang sama yaitu di Bulan Agustus dan Juli. Pengujian kualitas air sumur dalam analisis ini dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Hasil pengujian parameter NO_3 sebagai N menunjukkan terdapat 20 titik sampel tidak memenuhi baku mutu dan hanya 2 titik sampel yang memenuhi baku mutu. Konsentrasi

Nitrat yang paling tinggi berada di titik pantau air sumur RT04/RW19 Kelurahan Cibabat, dengan nilai konsentrasinya mencapai 120 mg/L. Hasil pengujian parameter Besi pada kualitas air sumur di Kota Cimahi menunjukkan terdapat 28 titik yang melebihi baku mutu (1 mg/L) dengan nilai konsentrasi paling tinggi mencapai 6,18 mg/L di Kelurahan Pasirkaliki RT05/RW03. Nilai konsentrasi Mangan paling tinggi terdapat di RT05/RW08 Kelurahan Citeureup yang mencapai 3,59 mg/L. Nilai konsentrasi *fecal coliform* paling tinggi terdapat di RT05/RW06 Kelurahan Melong yang mencapai 63.800/100ml.

2.2.4 Impact

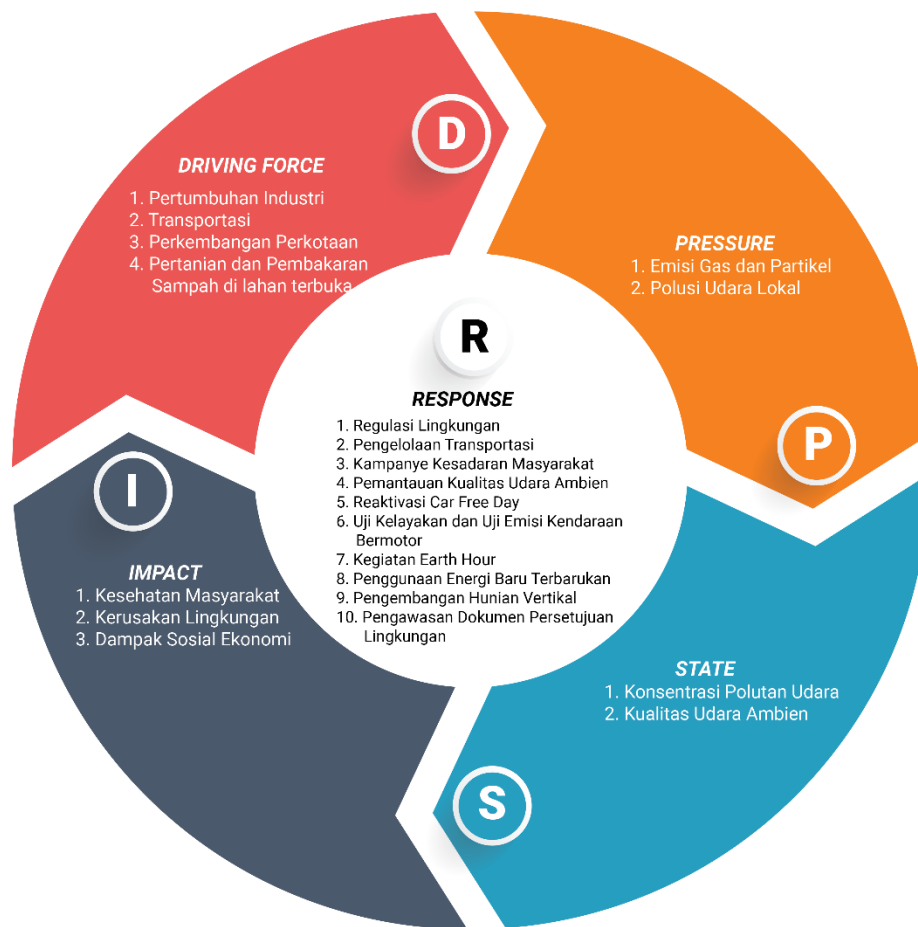
- a) Krisis Air
- b) Penyakit yang Diderita Masyarakat
- c) Sumber Air Minum/Air Bersih
- d) Penurunan Muka Air Tanah
- e) Pengaduan Masyarakat

2.2.5 Response

- a) Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Sumur Berkala
- b) Program Penurunan Beban Pencemar Sungai
- c) Program Sanitasi berbasis Masyarakat
- d) Pengadaan Sumur Resapan
- e) Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan
- f) Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum

2.3 Kualitas Udara

Pertumbuhan industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi peningkatan emisi yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Kerangka kerja analisis DPSIR Kota Cimahi terhadap isu kualitas udara dapat dilihat pada **Gambar 4.**



Gambar 6 Framework DPSIR Isu Kualitas Udara

2.3.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Industri
- b) Transportasi
- c) Perkembangan Perkotaan
- d) Pertanian dan Pembakaran Sampah di Lahan Terbuka

2.3.2 *Pressure*

- a) Emisi Gas dan Partikel
- b) Polusi Udara Lokal

2.3.3 *State*

- a) Konsentrasi Polutan Udara

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan metode *passive sampling* dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi pemantauan kualitas udara

pada tahun 2023 mencakup permukiman, transportasi, industri, dan perkantoran. Pengukuran kualitas udara di Kota Cimahi dilakukan pada perkantoran (Kantor di Kelurahan Cigugur Tengah), perumahan (Perumahan Pilar Mas), transportasi (PT Logam Bima), dan industri (PT Jenshiang Nusantara).

b) Kualitas Udara Ambien

Pada pengukuran kualitas udara ambien, baku mutu yang digunakan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dari perhitungan ISPU diperoleh bahwa kategori Tidak Sehat terjadi di Transportasi dengan nilai ISPU pada parameter $PM_{2,5}$ mencapai 115,48.

2.3.4 Impact

- a) Kesehatan Masyarakat
- b) Kerusakan Lingkungan
- c) Dampak Sosial Ekonomi

2.3.5 Response

- a) Regulasi Lingkungan
- b) Pengelolaan Transportasi
- c) Kampanye Kesadaran Masyarakat
- d) Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala
- e) Pengaktivasian Kembali *Car Free Day*
- f) Uji Kelayakan & Uji Emisi Kendaraan Bermotor
- g) Kegiatan *Earth Hour*
- h) Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- i) Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan

2.4 Risiko Bencana

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BNPB, Kota Cimahi memiliki skor risiko bencana sebesar 91,71 dengan kelas risiko sedang. Kerangka kerja analisis DPSIR Isu Risiko Bencana dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Gambar 7 Framework DPSIR Isu Risiko Bencana

2.4.1 Driving Force

- a) Letak Geografis Kota Cimahi
- b) Pertumbuhan Penduduk dan Perkotaan
- c) Perubahan Iklim

2.4.2 Pressure

- a) Kerentanan Infrastruktur
- b) Kerentanan Sosial dan Ekonomi
- c) Kerentanan Lingkungan

2.4.3 State

- a) Frekuensi dan Intensitas Bencana

elama tahun 2023, Kota Cimahi dilanda bencana beberapa bencana. Adapun bencana yang terjadi di Kota Cimahi yaitu bencana kebakaran, banjir, angin kencang, tanah longsor, dan pergerakan

tanah. Tercatat sebanyak 163 kejadian bencana yang terjadi di Kota Cimahi.

b) Kerusakan Infrastruktur dan Properti

Kota Cimahi sering menghadapi berbagai bencana alam yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan properti. Selama tahun 2023, perkiraan kerugian akibat bencana mencapai ±Rp2.413.450.000,00.

2.4.4 Impact

- a) Dampak Sosial
- b) Kerugian Ekonomi

2.4.5 Response

- a) Mitigasi Bencana
- b) Respons Darurat
- c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d) Penghijauan
- e) Pengadaan Sumur Resapan
- f) Inovasi Lingkungan
 - Cimahi Barengras
 - Cimahi Walagri
 - Pelestarian Kampung Adat
 - Pemberdayaan Komunitas Lingkungan
- g) Sosialisasi Kebersihan Lingkungan & Sekolah Formal

2.5 Perkotaan/Persampahan

Kerangka kerja analisis DPSIR isu perkotaan/persampahan dapat dilihat pada **Gambar 6**.



Gambar 8 Framework DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan

2.5.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Urbanisasi
- c) Konsumsi Barang
- d) Kurangnya Kesadaran Lingkungan

2.5.2 *Pressure*

- a) Peningkatan Volume Sampah
- b) Penggunaan Lahan untuk Pembuangan Sampah

2.5.3 *State*

- a) Timbulan Sampah Kota Cimahi

Timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 1.433,04 m³ per hari dan akan terus meningkat. Sebagian besar sampah ditimbulkan dari

Kecamatan Cimahi Selatan. Sebagian besar sampah ditimbulkan dari Kecamatan Cimahi Selatan. Distribusi timbulan sampah di Kecamatan Cimahi Selatan menimbulkan lebih banyak sampah karena jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kecamatan lainnya. Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara masing-masing berkontribusi 29% timbulan sampah di Kota Cimahi, sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan berkontribusi sebanyak 42% timbulan sampah Kota Cimahi.

b) Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sarana fasilitas buang air besar sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Berdasarkan data, tercatat masyarakat yang membuang air besarnya ke sungai berada di Kelurahan Melong, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Karang Mekar. Keadaan ini memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai dan berpotensi mencemari badan air. Sebanyak 93.564 RT telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri di Kota Cimahi, dan sebanyak 2.197 RT memiliki tempat buang air besar bersama. Namun terdapat 38.919 RT yang masih membuang air besarnya ke sungai.

c) Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Permasalahan terbesar Kota Cimahi dalam penanganan sampah adalah belum adanya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) mandiri di Kota Cimahi. Sulitnya Kota Cimahi dalam pencarian lahan menjadi penyebab utama dalam keterbatasan Kota Cimahi dalam menangani sampahnya.

2.5.4 *Impact*

- a) Kesehatan Masyarakat
- b) Kerusakan Ekosistem
- c) Dampak Ekonomi

2.5.5 *Response*

- a) Kebijakan dan Regulasi
- b) Program Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
- c) Investasi dalam Infrastruktur Pengelolaan Sampah
- d) Sosialisasi dan Edukasi
- e) Anggaran Pengelolaan Lingkungan
- f) Bank Sampah

2.6 **Tata Kelola**

Pada skala perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja analisis DPSIR isu tata kelola dapat dilihat pada **Gambar 6.**



Gambar 9 Framework DPSIR Isu Tata Kelola

2.6.1 *Driving Force*

- a) Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup
- b) Jumlah Penduduk Kota Cimahi
- c) Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi
- d) Tingkat Pendidikan Masyarakat
- e) Indeks Pembangunan Manusia

2.6.2 *Pressure*

- a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

2.6.3 *State*

- a) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi ditunjang dengan sumber daya manusia atau personil yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Instansi ini juga didukung oleh personil dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Pada tahun 2023, jumlah personil yang terikat dengan lembaga pengelola lingkungan hidup yaitu 99 orang.

- b) Jumlah Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan

Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan 38 dokumen izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebanyak 34 dokumen, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebanyak 4 dokumen.

- c) Jumlah Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Peningkatan jumlah pelaku usaha, khususnya industri yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga perlu diperhatikan kelengkapan perizinannya. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 14 perusahaan yang memiliki persetujuan teknis/rincian teknis limbah B3.

d) Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan yang menjadi inti perkembangan suatu kota perlu dibiayai, salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah adalah pajak, dan retribusi. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi di tahun 2023 adalah Rp235.616.755.113,00.

2.6.4 Impact

- a) Pengawasan Persetujuan Lingkungan
- b) Jumlah LSM Bidang Lingkungan Hidup
- c) Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

2.6.5 Response

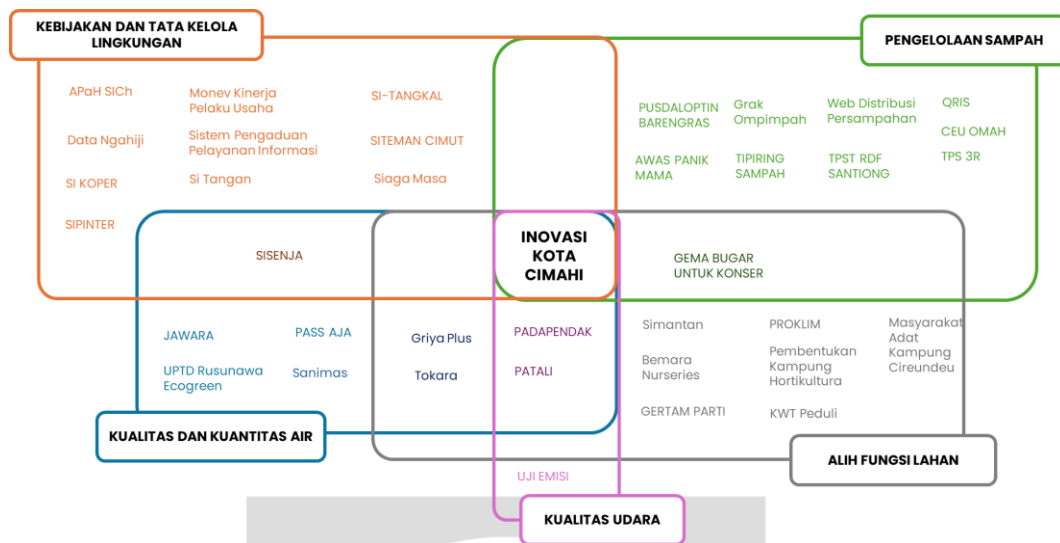
- a) Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Inovasi Daerah
- d) Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Penetapan isu prioritas dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD), diawali dengan paparan materi kepada para *stakeholders* di Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Masukan dan saran para *stakeholder* menjadi respons baik bagi tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2023. Penetapan isu prioritas dilakukan dengan pengisian formulir secara *online* (dalam jaringan) karena FGD kali ini dilaksanakan secara *hybrid*. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh bahwa 5 (lima) isu dengan nilai paling tinggi disetujui menjadi isu prioritas di Kota Cimahi. Berikut daftar isu prioritas di Kota Cimahi yang telah disepakati dan ditambahkan dengan *scoring* oleh Tim Internal Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Kualitas Udara
3. Pengelolaan Sampah
4. Alih Fungsi Lahan
5. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan

IV. INOVASI DAERAH



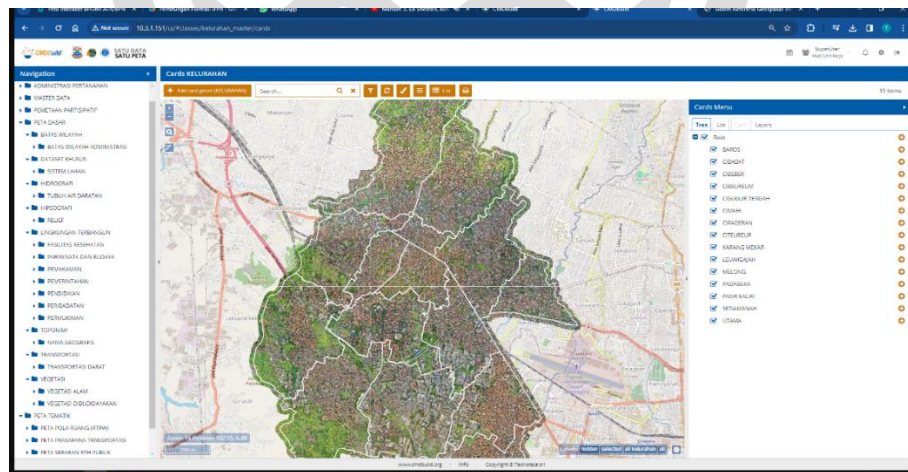
Gambar 10 Inovasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2023

4.1 PATALI

Pelaporan Persetujuan Lingkungan atau disingkat PATALI merupakan sistem laporan berbasis online untuk pelaporan monitoring lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Cimahi. PATALI dibuat pada tahun 2018 dan mulai disosialisasikan dan digunakan pada awal tahun 2019. Banyaknya database izin yang dimiliki pelaku usaha/kegiatan yang tidak tersusun dengan baik menjadi hambatan untuk instansi pengawas dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam melakukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha atau kegiatan. Adanya sistem informasi lingkungan membantu untuk merekap dan menyusun dokumen dan hasil pemantauan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan ketaatan pelaku usaha. Kedepannya, sistem akan dikembangkan untuk menghitung daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup Kota Cimahi. Data yang ada dalam sistem juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan kajian.

4.2 DATA NGAHIJI

Perwujudan Satu Data Satu Peta menjadi hal yang penting dalam setiap pengambilan kebijakan dari tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk semua kepentingan, sehingga keberadaan Data Ngeahiji sebagai wadah atau alat dalam penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Kota Cimahi yang dapat mengumpulkan semua data spasial, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran, karena dengan satu data satu peta ini dapat terwujud anggaran yang tepat sasaran dan tepat kebijakan. Dengan terwujudnya satu data satu peta ini pula dapat dengan mudah menilai tingkat perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dalam kurun waktu tertentu, informasi terkait pengembangan investasi di Kota Cimahi pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kualitas dokumen Rencana Tata Ruang dan upaya pengendaliannya akan juga akan mudah dan akurat.



Gambar 11 Dashboard Aplikasi Cimahi Ngahiji

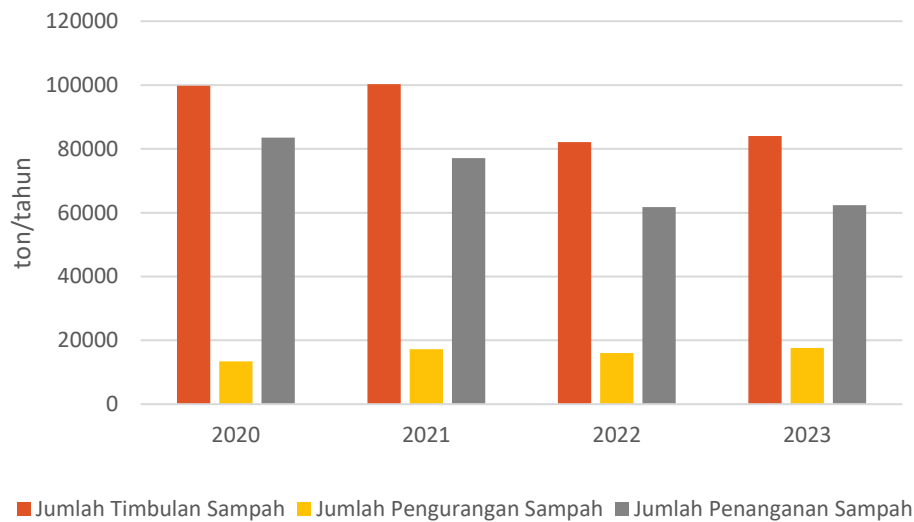
4.3 GRAK OMPIMPAH

Program GRAK OMPIMPAH mengacu pada prinsip pemanfaatan kembali sampah atau yang biasa dikenal dengan nama 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang dilakukan melalui upaya-upaya yang cerdas, efisien dan terprogram, maka pengelolaan sampah dapat lebih efisien. Namun dalam perjalanannya, program 3R masih menghadapi kendala utama, yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memilah sampah.

Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi, tentu harus dimulai dari sumbernya. Hal ini harus didukung dengan peran serta masyarakat untuk memilah sampah. Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mencanangkan program Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (Grak Ompimpah). Dalam program tersebut, dipilih 4 kader dari masing-masing untuk melaksanakan door to door education atau disingkat DTDE. Pada DTDE, kader di tiap RW mengedukasi masyarakat di RW dari rumah ke rumah untuk memilah sampah. Setelah DTDE dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan door to door collection atau DTDC, dimana kader kembali ke rumah-rumah yang telah diedukasi untuk memastikan bahwa masyarakat telah memilah sampah. DTDC bisa dilakukan beberapa kali sampai rumah tersebut benar-benar memilah sampah.



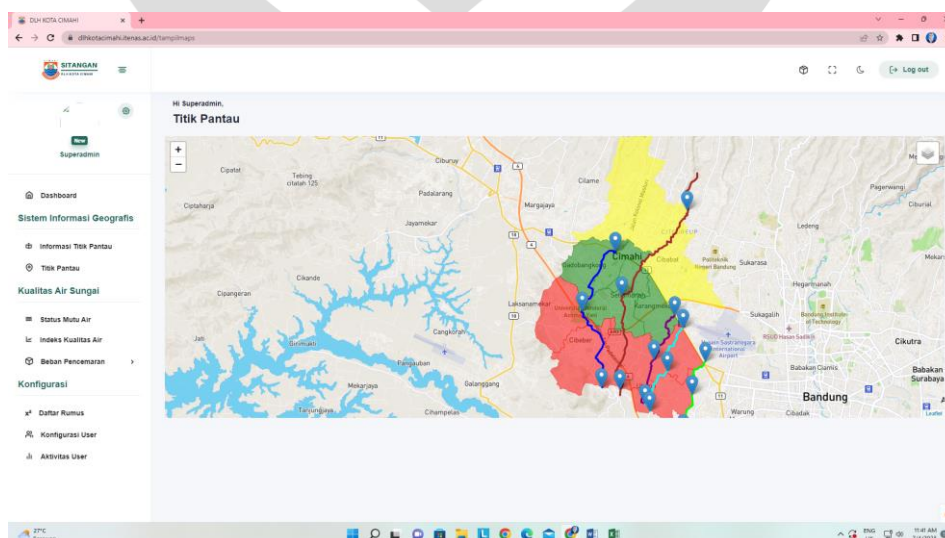
Gambar 12 Kegiatan Grak Ompimpah



Gambar 13 Tren Pengelolaan Sampah

4.4 SITANGAN

Pengembangan modul *Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup* dilakukan untuk mendukung manajemen organisasi pemerintahan di lingkungan DLH Kota Cimahi serta dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan pelaksanaan ketentuan dalam PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan layanan berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.



Gambar 14 Dashboard SITANGAN

V. PENUTUP

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi adalah gambaran secara umum pengelolaan lingkungan hidup yang berisi informasi aktual dalam hal ini disampaikan dalam tahun 2023. Berdasarkan analisis isu lingkungan hidup dan isu prioritas yang telah dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

- Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah:
 1. Kualitas dan Kuantitas Air
 2. Kualitas Udara
 3. Pengelolaan Sampah
 4. Alih Fungsi Lahan
 5. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan
- Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi isu lingkungan hidup prioritas dituangkan dalam bentuk Inovasi Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain:

- Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Cimahi.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah Kota Cimahi untuk mencapai nilai IKLH
- Melakukan berbagai pengembangan upaya pengelolaan sampah seperti pengurangan sampah dari sumbernya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan sirkular ekonomi, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir

dan mencapai target pengurangan-penanganan sampah sesuai Jakstrada Kota Cimahi.

- Merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan walikota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sistem informasi berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan pada masyarakat juga mengurangi emisi sektor transportasi.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkait pengawasan emisi dari sumber titik.
- Mengurangi terjadinya alih fungsi lahan, terutama ruang terbuka yang memiliki indikasi jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari lahan terbuka melalui pengembangan agroforestri dan ekowisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar.

